

**PELAKSANAAN UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG
PERJANJIAN BAGI HASIL PEMANFAATAN TANAH PERTANIAN
DI KELURAHAN DOKIRI KECAMATAN TIDORE SELATAN
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

Gagan Wisba Kusuma / NPM. 01012011189
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Khairun

ABSTRAK

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pemanfaatan Tanah Pertanian di Kelurahan Dokiri Kecamatan Tidore Selatan Kota Tidore Kepulauan.

Perjanjian bagi hasil adalah kontrak antara pemilik tanah dan penggarap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, pemerintah mengatur perjanjian bagi hasil untuk melindungi penggarap dari praktik-praktik yang merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak sistem perjanjian bagi hasil terhadap efektifitas undang-undang ini serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di Kelurahan Dokiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sering dilakukan secara lisan sesuai adat setempat, dan terdapat masalah karena ketidakpatuhan terhadap kesepakatan dan ketidakadilan pemilik tanah terhadap penggarap. Disarankan agar perjanjian mengikuti ketentuan undang-undang dan pemerintah setempat melakukan sosialisasi hukum terkait kepada masyarakat.

Kata Kunci: Perjanjian Bagi Hasil, Tanah Pertanian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

Abstract

Implementation of Law Number 2 of 1960 concerning Sharecropping Agreements for Agricultural Land Use in Dokiri Village, South Tidore District, Tidore Islands City.

A sharecropping agreement is a contract between landowners and tenants. Based on Law Number 2 of 1960, the government regulates sharecropping agreements to protect tenants from exploitative practices. This research aims to examine the impact of the sharecropping system on the effectiveness of this law and the factors influencing its implementation in Dokiri Village. The study found that agreements are often made orally according to local customs, and issues arise due to non-compliance with agreements and injustice by landowners towards tenants. It is recommended that agreements follow legal provisions and that local governments conduct legal education for the community.

Keywords: Sharecropping Agreement, Agricultural Land, Law Number 2 of 1960